

## BAB III

### DAMPAK NEGATIF ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN TERHADAP KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2017

#### 3.1 Menurunnya Jumlah Produksi Padi

Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian khususnya lahan sawah akan memberikan dampak langsung terhadap produksi pada dan juga nilai produksi hasil pertanian atau khususnya padi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Penurunan luas lahan pertanian yang disebabkan oleh alih fungsi lahan akan menyebabkan terjadinya penurunan hasil produksi hasil pertanian apabila tidak diimbangi dengan usaha peningkatan faktor-faktor lain yang mendukung proses produksi, seperti penerapan teknologi dan ketersediaan irigasi yang lebih baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sumarno sebagai Kepala Seksi Bina Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Sleman. Beliau menjelaskan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan jumlah produksi hasil pertanian adalah sebagai berikut :

*“Dalam meningkatkan jumlah hasil produksi pertanian ini kami melakukan Panca Usaha Tani, Sapta Usaha Tani, kami juga memberikan subsidi pada pupuk pertanian yang dibutuhkan, contoh pupuknya yaitu seperti pupuk Urea dan Mpk”* (wawancara 24 Juli 2017).

Adanya alih fungsi lahan memberikan dampak langsung terhadap jumlah produksi pada yang hilang yang dipengaruhi oleh produktivitas lahan sawah, luas panen yang hilang dan pola tanam yang diterapkan. Luas panen merupakan luasan pertanian

yang digarap atau berhasil dipanen dalam satu tahun. Jumlah hasil produksi pertanian Kabupaten Sleman pada Tahun 2014-2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel : 3. 4**  
**Jumlah Produksi Pertanian**

NO	Pertanian	Tahun		
		2015/Ton	2016/Ton	2017/Ton
1	Padi Sawah	326.819	322.418	289.070
2	Padi Ladang	1.864	1.751	1.557
3	Jagung	41.619	22.574	47.060
4	Kedelai	199	88	88.00
5	Kacang Tanah	6.485	4.389	4.209
6	Kacang Hijau	10.00		
7	Ubi Kayu	11.524	12.086	11.569
8	Ubi Jalar	2.355	2.071	1.569
10	Talas	1.251	1.388	1.204
11	Ganyong	152	148	115
12	Irut	557	571	659
	<b>Jumlah</b>	<b>395.190</b>	<b>367.484</b>	<b>355.531</b>

Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kab Sleman 2018.

Berdasarkan tabel di atas kita dapat menyimpulkan dengan adanya alih fungsi lahan di Kabupaten Sleman mempengaruhi jumlah hasil produksi pertanian. Dapat kita lihat pada Tahun 2015 jumlah hasil produksi pertanian Kabupaten Sleman mencapai 395.190 ton, akan tetapi pada tahun 2017 jumlah hasil produksi pertanian Kabupaten Sleman mengalami penurunan hingga 355.531 ton. Dengan itu selama 2015-2017 hasil produksi pertanian Kabupaten Sleman mengalami penurunan jumlah produksi sebesar 39.659 ton.

Jumlah lahan pertanian khususnya lahan persawahan yang terus berkurang dalam setiap tahunnya maka akan sangat berpengaruh kepada hasil produksi pertanian di Kabupaten Sleman, namun berdasarkan analisi yang dikatan Bapak Sumarno beliau mengatakan :

*“meskipun lahan pertanian terus berkurang dalam setiap tahunnya, jumlah hasil produksi pertanian Kabupaten Sleman saat ini masih mengalami Surplus sekitar 100rb Ton, analisis saya untuk 30 tahun kedepan Kabupaten Sleman masih mampu memenuhi kebutuhan pangan sendiri.”* (wawancara 24 Juli 2017).

Melihat pada pernyataan Bapak Sumarno maka pada saat ini Kabupaten Sleman masih bisa Mencukupi Kebutuhan pangan mereka, bahkan hasil pertanian yang mereka hasilkan saat ini masih mengalami kelebihan sebesar 100 ton.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di analisis bahwa jumlah lahan pertanian di Kabupaten Sleman memang mengalami penurunan dalam setiap tahunnya, tentunya dengan penurunan lahan tersebut maka berdampak pada jumlah hasil produksi pertanian Sleman juga menurun. Jumlah hasil produksi pertanian yang menurun sejauh ini belum memengaruhi kemampuan Kabupaten Sleman dalam memenuhi kebutuhan Pangan mereka, akan tetapi jika permasalahan alih fungsi lahan tidak ditangani secara serius maka dampak yang akan dihasilkan akan membahayakan kesediaan produksi pangan dari Kabupaten Sleman itu sendiri. Dengan itu perlu di tindak lanjuti secara serius mengenai permasalahan alih fungsi lahan ini agar menjaga kestabilan jumlah hasil produksi pangan di Kabupaten Sleman.

### **3.2 Menimbulkan Konflik Sosial**

Maraknya jumlah alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, adanya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian tidak hanya memiliki dampak pada sektor pertanian saja, akan tetapi dampak yang disebabkan dengan adanya alih fungsi lahan tersebut berdampak pada sosial dan ekonomi. Adanya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian menimbulkan konflik antara masyarakat dan para pengembang, petani yang mengalihfungsikan lahan pertaniannya mengalami peralihan

bekerja dari penggarap lahan sendiri menjadi buruh tani atau menjadi pekerja yang lainnya.

Dari hasil wawancara dengan bapak Sumarno tentang petani yang mengalihfungsikan lahannya, beliau menjelaskan bahwa tentang pencaharian setelahnya seperti di bawah ini :

*“petani yang mengalih fungsikan lahan pertaniannya biasanya mereka tidak memiliki lahan pertanian yang cukup luas, dan setelah lahan pertaniannya dialih fungsikan maka mereka memenuhi kebutuhannya menjadi buruh tukang, dan juga bisa menjadi buruh tani pada petani yang memiliki lahan pertanian”*  
(wawancara 24 Juli 2017).

Sebagian contoh kasus adanya konflik antara warga dengan pengembang yaitu adanya penolakan dari warga terhadap empat pembangunan Apartment, penolakan yang dilakukan oleh warga tersebut dikhawatirkan dengan adanya pembangunan apartment tersebut akan mengakibatkan berkurangnya ketersediaan air tanah dan akan menimbulkan kemacetan. (tataruang.com, Juni 2015, <http://tataruang.com/penolakan-warga-terhadap-pembangunan-apartmen>, 24 Juli 2018).

Untuk mengatasi permasalahan pembangunan hotel, apartement, dan kondotel yang semakin bertambah di Kabupaten Sleman, pemerintah mengeluarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pemberhentian Sementara Pendirian Pembangunan Hotel, Apartment Dan Kondotel hingga akhir 31 Desember 2021.

Permasalahan sosial lain yang di akibatkan dengan adanya alih fungsi lahan tersebut yaitu beralihnya para petani menjadi pekerja informal seperti pedagang kaki lima dan pembantu rumah tangga. Permasalahan yang muncul juga petani menjual lahan

pertanian dan setelah itu mereka tidak memiliki keterampilan untuk menjadi pekerja formal. Masalah sosial lain yang disebabkan dengan adanya alih fungsi lahan yaitu adanya kerenggangan hubungan sosial antara masyarakat asli dan pendatang. (tataruang.com, 2015).

### **3.4 Meningkatkan Jumlah Lahan Tidur**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama Bapak Sumarno Sebagai Kepala Seksi Bina Produksi Bidang Tanaman Pangan di Dinas Perikanan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sleman, beliau menjelaskan tentang lahan tidur di Kabupaten Sleman seperti dibawah ini “

*“saya tidak mengetahui tentang adanya lahan tidur, kami juga tidak mempunyai data seberapa jumlah luas lahan tidur di Kabupaten Sleman” (wawancara 24 Juli 2017 ).*

Dengan hasil wawancara yang telah dilakukan, pihak Dinas terkait tidak memberikan data atau tidak mengetahui dengan adanya lahan tidur atau adanya pembangunan mangkrak yang ada di Kabupaten Sleman. **Penulis** melakukan pencarian mengenai pemberitaan tentang adanya bangunan yang mangkrak di Kabupaten Sleman. Beberapa temuan penulis mengenai adanya bangunan yang mangkrak adalah sebagai berikut :

Bupati Sleman Sri Purnomo mengatakan bahwa terdapat bangunan mangkrak yang terdapat di Kabupaten Sleman, bangunan yang mangkrak tersebut adalah bangunan rehabilitasi pembangunan Pasar Induk Sleman. Pembangunan rehabilitasi tersebut tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan (Sindonews.com. 2017).

Contoh kasus bangunan mangkrak lainnya adalah adanya pembangunan depo sampah milik DLH Kabupaten Sleman yang mangkrak, depo sampah tersebut berada di Desa Triharjo,

Sleman. Pembanguann depo sampah tersebut menghabiskan dana sebesar 300 jt. Lahan yang digunakan dalam pembangunan depo sampah tersebut sebelumnya lahan pertanian yang produktif, luas lahan yang digunakan 600 meter persegi. Pembangunan yang mangkrak tersebut dicurigai tidak adanya perencanaan anggaran pembangunan infrastruktur pendukung (Wartankonstruksi.com, Juli 2018).

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan maka di Kabupaten Sleman tidak memiliki lahan pertanian yang tidak terpakai. Tidak sampai disitu, penulis melakukan penelusuran diberita yang ada, maka penulis mendapatkan beberapa contoh kasus pembangunan yang mangkrak di Kabupaten Seman. Salah satu temuan yang didapatkan adanya pembangunan yang mangkrak, pembangunan tesebut yang sebelumnya merupakan lahan pertanian yang produktif. Dengan temuan tersebut maka sangat disayangkan jika lahan pertanian yang sebelumnya produktif namun di alih fungsikan menjadi fungsi non pertanian, dan pembangunan tersebut juga tidak memiliki manfaat bagi masyarakat. Adanya permasalahan tersebut diperlukannya pengawasan yang lebih baik lagi agar tidak terjadi adanya lahan tidur atau lahan yang tidak ada manfaatnya bagi masyarakat.

### **3.4 Berkurangnya Ekosistem Sawah**

Alih fungsi lahan atau yang biasa disebut perubahan pemanfaatan lahan pertanian ke non petanian di Kabupaten Sleman terjadi setiap tahun. Terjadinya alih fungsi lahan tersebut merupakan suatu akibat yang disebabkan oleh adanya jumlah pertambahan penduduk yang sejalan dengan pembangunan dan pertumbuhan pada sektor ekonomi. Adanya aktivitas pembangunan yang semakin meningkat dalam setiap tahunnya maka akan sangat mempengaruhi sumberdaya lahan.

Alih fungsi lahan di Kabupaten Sleman terjadi disebabkan oleh dua faktor, faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal yang ada di Kabupaten Sleman disebabkan dari wilayah itu sendiri yaitu seperti adanya pembangunan permukiman, perindustrian, perdagangan, perkantoran dan pembangunan lainnya. Sedangkan faktor internal tersebut adalah disebabkan oleh pemilik lahan itu sendiri yaitu para petani yang memiliki lahan pertanian.

Yang perlu diketahui dalam melakukan pembangunan adalah memperhatikan bagaimana rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang berlaku. Menurut Perda No. 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, RT RW Kabupaten merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang kabupaten, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah kabupaten, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten, serta keserasian antar sektor, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten. Tujuan Perda ini adalah mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Sleman yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisien dalam alokasi investasi, bersinergi dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Sleman terbagi menjadi 4 wilayah, yaitu:

1. Wilayah Utara (lereng Gunung Merapi)

Dimulai dari jalan yang menghubungkan kota Tempel, Pakem, dan Cangkringan (ringbelt) sampai dengan puncak Gunung Merapi. Wilayah ini merupakan sumber daya

air dan ekowisata yang berorientasi pada aktivitas Gunung Merapi dan ekosistemnya. Bagian utara wilayah Kabupaten Sleman, bila dilihat dari faktor tanah, curah hujan serta kelereng lahan cocok untuk kawasan resapan air. Hutan yang berada di sekitar Gunung Merapi penting keberadaannya untuk memenuhi kondisi hutan nasional. Hutan ini telah ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung dengan nama Taman Nasional Gunung Merapi. Penetapan ini telah membuat pemanfaatan kawasan yang tidak hanya berada di Kabupaten Sleman, tetapi juga Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Magelang menjadi sangat ketat dan terutama hanya untuk hutan lindung. Kawasan yang berada di bawahnya diperbolehkan untuk menjadi kawasan budidaya yang sesuai dengan kondisi lahan, yaitu pertanian. Dengan demikian, pemanfaatan lahan tidak sampai merusak bentang alam yang ada. Perubahan guna lahan secara terbatas untuk pariwisata, industri maupun permukiman diperbolehkan untuk tetap mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah kawasan Sleman utara ini.

## 2. Wilayah Timur

Meliputi Kecamatan Prambanan, sebagian Kecamatan Kalasan, dan Kecamatan Berbah. Wilayah ini merupakan tempat peninggalan purbakala (candi) yang merupakan pusat wisata budaya, daerah lahan kering, serta sumber bahan batu putih. Situs-situs yang berupa candi ada yang sudah tercatat oleh BP3 (Badan Pelestarian Peninggalan Purbakala) dan dalam pemanfaatan untuk tujuan wisata, yaitu Kompleks Candi Prambanan dan Candi Ratu Boko namun sebagian besar belum dikembangkan. Penetapan Kawasan Pengembangan ini terutama untuk memastikan konservasi terhadap situs-situs ini. Kegiatan industri pengolahan masih diperbolehkan selama tidak mengganggu keberadaan kawasan budaya sehingga yang perlu dilakukan adalah mendata secara



lengkap peninggalan berupa candi dan menetapkan deliniasi serta tindakan untuk memungkinkan orang dapat melakukan apresiasi terhadap candi-candi tersebut. Perubahan guna lahan secara terbatas untuk pariwisata, industri maupun permukiman diperbolehkan untuk tetap mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah kawasan ini.

### 3. Wilayah Selatan

Yaitu Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta (APY) yang meliputi Kecamatan Mlati, Sleman, Ngaglik, Ngemplak, Depok, dan Gamping. Wilayah ini merupakan pusat pendidikan, perdagangan dan jasa. Kawasan pengembangan selatan adalah area yang sebagian besar perkotaan dengan aktivitas ekonomi yang dominan pada sektor tersier. Sektor ini merupakan penyumbang terbesar untuk PDRB Kabupaten Sleman secara keseluruhan.

### 4. Wilayah Barat

Meliputi Kecamatan Godean, Minggir, Seyegan, dan Moyudan, merupakan daerah pertanian lahan basah yang tersedia cukup air dan sumber bahan baku kegiatan industri kerajinan mendong, bambu, serta gerabah. Kawasan pengembangan barat merupakan kawasan yang basis pengembangan ekonomi adalah pertanian serta industri pengolahan yang material oriented.

Adanya peralihan fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian di Kabupaten Sleman disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Kedua faktor tersebut adalah sebagai berikut :

#### a. Faktor eksternal

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan, faktor makro yang mempengaruhi adanya peralihan fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian adalah sebagai berikut :

1. Adanya pembangunan pada sektor permukiman
2. Pembangunan pada sektor perdagangan dan jasa
3. Munculnya pembangunan industri-industri baru
4. Pembangunan sarana pelayanan umum dan lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sumarno selaku Kepala Bina Produksi Tanaman pangan di Kabupaten Sleman pada beliau pun mengatakan bahwa :

*“Penyebab adanya alih fungsi lahan pertanian dari luar itu terus bertambahnya jumlah pembangunan permukiman, sarana dan prasarana, terus ada banyak pembangunan lainnya”*(wawancara 24 Juli 2017 )

Perubahan penggunaan lahan terjadi pada lahan pertanian menjadi non pertanian seperti tumbuhnya jumlah perindustrian, jumlah pemukiman yang terus bertambah, pembangunan perkantoran, pembangunan pertokoan, restoran, pembangunan jalan raya dan jenis pembangunan lainnya yang sifatnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Keterangan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel : 3.1**

**Data Izin Peruntukan Penggunaan Tanah**

Tahun	Permukiman/ m	Perkantoran/ m	Industr/m	Perdagangan dan jasa/	Sarana pelayanan	Jumlah/m
-------	------------------	-------------------	-----------	--------------------------	---------------------	----------

				m	umum/m	
2016	287 864	96 111	58 323	273 881	120 334	836 513
2017	588 305	78 074	85 569	250 907	86 478	1.089.333

Sumber: DPMPTT Kabupaten Sleman 2018 (di olah)

Dari tabel di atas dapat di simpulkan bahwa jumlah izin peruntukan tanah di Kabupaten Sleman dalam setiap tahunnya memiliki peningkatan yang cukup besar, jumlah perizinan peruntukan tanah pada tahun 2016 seluas 836.513m dan pada tahun 2017 jumlah izin peruntukan tanah yang masuk di Dinas DPMPTT Kabupaten Sleman jumlahnya bertambah menjadi 1.089.333m. dapat di lihat dari tabel di atas bahwa izin peruntukan tanah dalam pembangunan permukiman melonjak cukup drastis yang pada tahun 2016 seluas 287.864m dan pada tahun 2017 melonjak menjadi seluas 588.305. Dengan data tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah kebutuhan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terus meningkat dalam setiap tahunnya.

Dengan keterangan yang telah dijelaskan faktor makro yang menyebabkan adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan pertanian adalah adanya pembangunan permukiman yang sangat besar. Meski disetiap pembangunannya tidak selalu menggunakan lahan pertanian tetapi menggunakan lahan lainnya. Pembangunan perumahan di Kabupaten Sleman tidak semuanya memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah, terdapat perumahan yang menyalahi aturan RTRW Kabupaten Sleman. Keterangan tersebut dijelaskan oleh Bapak Sumarno selaku Kepala Bina Produksi Tanaman pangan di Kabupaten Sleman, beliau pun mengatakan bahwa :

*“Terdapat beberapa pembangunan perumahan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada, sebagian mereka menyalahi aturan yang berlaku. Apa yang*

*mereka ajukan dalam perizinan peruntukan tidak sesuai dengan yang mereka gunakan pada lahan tersebut". (wawancara 24 Juli 2017)*

Dengan permasalahan tersebut pemerintah Kabupaten Sleman harus lebih ketat dalam mengawasi pembangunan dan perizinan bangunan yang ada di Kabupaten Sleman, hal itu bertujuan agar tidak terjadinya penyalahan aturan yang berlaku. Kabupaten Sleman sendiri juga perlu membatasi perizinan yang diberikan.

#### b. Faktor mikro

Penyebab terjadinya alih fungsi lahan tidak hanya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang ada ditingkat wilayah, akan tetapi alih fungsi lahan tersebut dapat dipengaruhi oleh para petani itu sendiri. Faktor mikro alih fungsi lahan yang disebabkan oleh para petani itu disebabkan lahan yang petani alih fungsikan tersebut milik para petani itu sendiri. Saat ini lahan persawahan yang petani miliki tersebut dijual kepada para investor atau para pengembang, maka kepemilikan lahan tersebut menjadi hak milik bagi investor dan para pengembang, sehingga lahan yang sebelumnya merupakan lahan pertanian maka mereka alih fungsikan menjadi suatu industri atau pemukiman. Permasalahan ini bisa ditindak lanjuti lagi untuk mengetahui apa penyebab petani ingin menjual lahan kepada para investor.

Beberapa faktor mikro yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan di Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut :

1. Bertambahnya jumlah penduduk, dengan jumlah penduduk yang semakin tahunnya terus bertambah maka kebutuhan tempat tinggal mereka juga akan bertambah dalam setiap tahunnya.

2. Pemilik lahan menjual lahan pertaniannya kepada investor
3. Pemilik lahan pertanian mengalihfungsikan lahannya menjadi permukiman
4. Kurangnya kesadaran pemilik lahan terhadap pentingnya lahan pertanian
5. Pemilik lahan tidak mengetahui tentang adanya aturan RTRW di Kabupaten Sleman

Dalam mengetahui faktor apa saja yang membuat petani melakukan alih fungsi lahan atau menjual lahan pertaniannya kepada investor, pada umumnya permasalahan yang menyebabkan petani ingin mengalih fungsikan lahannya yaitu jumlah tanggungan, pengalaman bertani, luas sawah, biaya produksi, dan proporsi pendapatan dari usaha tani. faktor yang menyebabkan petani ingin mengalih fungsikan lahannya yaitu tidak pahami masyarakat mengenai RTRW itu sendiri dan jumlah tanggungan keluarga, permasalahan ini berkaitan dengan bertambahnya jumlah keluarga petani tersebut. Beliau menambahkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan petani melakukan alih fungsi lahan, akan tetapi faktor utama yang membuat petani melakukan alih fungsi lahan yaitu kurang pahami masyarakat mengenai peraturan RTRW daerahnya hal itu juga menyebabkan berkurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keberlangsungan lahan pertanian mereka.

Pernyataan di atas dijelaskan oleh Bapak Sumarno Sebagai Kepala Seksi Bina Produksi Bidang Tanaman Pangan di Dinas Perikanan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sleman bahwa:

*“ para petani belum memahami adanya peraturan RTRW yang berlaku, kurangnya kesadaran petani untuk menjaga lahan pertanian mereka, dan para petani merasa hasil dari bertani padikurang menjanjikan” (wawancara 24 Juli 2017)*

Upaya langsung dilakukan pemerintah kepada para petani dalam menekan jumlah alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sleman yaitu dengan cara memberikan bantuan dalam bentuk alat pertanian seperti mesin pembajak sawah yang diberikan kepada kelompok tani yang ada di masyarakat, alat tersebut dapat digunakan oleh para petani untuk mengolah lahan pertanian mereka. Upaya selanjutnya yang dilakukan pemerintah yaitu memberikan subsidi pada biaya pupuk yang di gunakan oleh para petani.

Berdasarkan keterangan di atas maka disini petani perlu memiliki kesadaran tentang pentingnya lahan persawahan. Namun apa yang dilakukan petani tersebut cukup rasional dikarenakan hasil dari pertanian mereka tidak begitu menjanjikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. namun melihat permasalahan yang ada pemerintah Kabupaten Sleman tidak tinggal diam, apa yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sleman sudah cukup baik. Apa yang sudah dilakukan pemerintah seharusnya lebih ditingkatkan lagi dan dapat memperhatikan kesejahteraan para petani, jika petani merasa sejahtera dengan hasil pertaniannya maka para petani tidak akan menjual atau menjadikan lahan pertanian mereka dijadikan tempat usaha lainnya.

Jumlah izin peruntukan tanah yang meningkat dan kurangnya kesadaran pemilik lahan pertanian akan pentingnya lahan pertanian di Kabupaten Sleman maka akan berpengaruh pada jumlah lahan pertanian yang ada di Kabupaten Sleman. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sumarno selaku Kepala Bina Produksi Tanaman pangan di Kabupaten Sleman beliau pun mengatakan bahwa:

*“kondisi pertanian di Kabupaten Sleman slama ini mengalami jumlah penyusutan Lahan pertanian, ya pada khususnya pada sektor pertanian sawah.sektor pertanian di Kabupaten Sleman terdesak dengan adanya pembangunan ”(wawancara 24 Juli 2017).*

Keterangan yang diberikan oleh bapak Sumarno di atas dapat di jelaskan berdasarkan tabel mengenai luas lahan pertanian di Kabupaten Sleman di bawah ini:

**Tabel : 3.2**  
**Luas lahan pertanian di Kabupaten Sleman**

No	Tahun	Lahan persawahan	Non persawahan	Jumlah
	1	2013	22.623	20.561
2	2014	22.233	20.905	43.138
3	2015	21.907	20.771	42.678
4	2016	21.842	20.603	42.445
5	2017	21.634	20.603	42.234

Sumber : Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman 2018 (diolah).

Tabel di atas menunjukkan bahwa terjadi perubahan jumlah penggunaan lahan pertanian baik pertanian sawah maupun non sawah di Kabupaten Sleman. Luas penggunaan lahan pertanian sawah maupun non sawah terlihat berkurang dalam setiap tahunnya. Jumlah lahan pertanian sawah maupun non sawah dalam waktu 2013-2017 jumlahnya terlihat berkurang sebesar 950 ha. Melihat tabel diatas dapat disimpulkan tidak pernah terjadi adanya penambahan jumlah lahan pertanian sawah maupun non sawah, hal ini dikarenakan Kabupaten Sleman tidak memiliki ruang atau tempat untuk menambah jumlah lahan pertanian mereka.

Pada tahun 2016-2017 lahan pertanian non sawah jumlahnya tidak berkurang, sedangkan pada lahan pertanian sawah dalam setiap tahunnya terus mengalami penurunan jumlah luas lahannya. Dengan adanya penurunan jumlah lahan persawahan

maupun non sawah, luas lahan pertanian di Kabupaten Sleman berubah dari 43.184 ha pada tahun 2013 menjadi 42.445 ha pada tahun 2017.

Jadi dengan keterangan di atas bahwa terus meningkatnya jumlah penduduk dan ekonomi yang semakin meningkat terjadi di Kabupaten Sleman, maka semakin banyak juga tempat yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. dengan adanya jumlah pembangunan yang terjadi dalam setiap tahunnya dan jumlah pembangunannya tersebut memiliki jumlah yang cukup besar maka dalam pembangunan di Kabupaten Sleman akan berdampak pada jumlah lahan pertanian yang ada. Dengan adanya permasalahan tersebut maka diperlukannya perlindungan lahan pertanian supaya jumlah lahan pertanian di Kabupaten Sleman tidak terus berkurang. jika lahan pertanian terus berkurang dalam setiap tahunnya maka akan berdampak pada jumlah hasil produksi pertanian di Kabupaten Sleman. Menurunnya jumlah hasil produksi di Kabupaten Sleman yang terjadi dengan adanya alih fungsi lahan pertanian tersebut maka akan berpengaruh pada ketersediaan pangan di Yogyakarta, Kabupaten Sleman merupakan lumbung padi di Yogyakarta.

### **3.5 Dampak Negatif Alih Fungsi Lahan Terhadap Ketahanan Pangan**

#### **3.5.1 Produksi Lahan Pertanian dan Kebutuhan**

Sistem ketahanan pangan di Indonesia secara komperhensif meliputi empat sub sistem yaitu :

1. Ketersediaan pangan dalam jumlah dan jenis yang cukup yang untuk memenuhi seluruh kebutuhan penduduk.



2. Distribusi pangan yang cukup dan merata.
3. Konsumsi pangan setiap individu yang memenuhi kecukupan gizi yang seimbang.
4. Status gizi yang baik pada masyarakat.

Dengan demikian, sistem ketahanan pangan dan gizi tidak hanya menyangkut soal produksi, distribusi, dan penyediaan pangan ditingkat makro, tetapi menyangkut aspek mikro, yaitu akses pangan ditingkat rumah tangga dan individu serta status gizi anggota rumah tangga.

Jumlah produksi hasil pertanian dari Kabupaten Sleman pada Tahun 2014-2015 menunjukkan ada kenaikan jumlah hasil produksi pertanian dari 374.84 ton menjadi 395.190 ton. Pada Tahun 2015-2016 menunjukkan adanya jumlah hasil produksi pertanian di Kabupaten Sleman yaitu 395.190 ton menjadi 367.484 ton pada Tahun 2016. Pada Tahun 2016-2017 produksi lahan pertanian kabupaten sleman mengalami penurunan kembali yaitu dari 367.484 ton menjadi 355.531 ton pada Tahun 2017. Berdasarkan pada penjelasan tersebut maka lebih diperjelas kembali dengan tabel dibawah ini :

**Tabel : 3.5**  
**Hasil Produksi Pertanian Kabupaten Sleman**

NO	Pertanian	Tahun				
		2013/Ton	2014/Ton	2015/Ton	2016/Ton	2017/Ton
1	Padi Sawah	306.036	312.891	326.819	322.418	289.070
2	Padi Ladang	1.668	1.511	1.864	1.751	1.557
3	Jagung	36.465	33.431	41.619	22.574	47.060

4	Kedelai	54	530	199	88	88.00
5	Kacang Tanah	6.729	8.671	6.485	4.389	4.209
6	Kacang Hijau	7.00	9.00	10.00		
7	Ubi Kayu	11.482	13.418	11.524	12.086	11.569
8	Ubi Jalar	3.228	3.400	2.355	2.071	1.569
10	Talas	438	523	1.251	1.388	1.204
11	Ganyong	244	76	152	148	115
12	Irut	198	389	557	571	659
	<b>Jumlah</b>	366.549	374.849	395.190	367.484	355.531

Sumber : Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan Kabupaten Sleman 2018 (Diolah)

### 3.8.2 Ketersediaan Kebutuhan Pangan Kabupaten Sleman

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Susi Sebagai Kepala Seksi Ketahanan Pangan Kabupaten Sleman, kondisi pangan Kabupaten Sleman pada saat ini tahun 2017-2020 berdasarkan ketersediaan dan produksinya masih mencukupi kebutuhan penduduk Kabupaten Sleman. Jumlah ketersediaan pangan di Kabupaten Sleman saat ini dalam setiap Tahunnya mengalami penurunan. Jumlah ketersediaan pangan di Kabupaten Sleman dapat di lihat pada Tabel di bawah ini :

**Tabel : 3.6**  
**Ketersediaan Komoditas Pangan**

No	Kelompok Pangan	Ketersediaan Pangan			
		2017/ton	2018/ton	2019/ton	2020/ton
1	Padi – Padian	195.618,07	182.260,72	168,903	141,188,70
2	Umbi –Umbian	22,639,37	28,613,15	34,586,93	46,534,48

Sumber : Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan Kabupaten Sleman 2018 (Diolah).

Tabel di atas merupakan jumlah persediaan yang telah di hitung oleh pemerintah Kabupaten Sleman, jumlah persediaan yang semakin Tahunnya menurun tersebut masih cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan. Melihat kondisi ketersediaan pangan yang semakin menurun jumlahnya tersebut maka pihak pemerintah terus melakukan upaya agar kondisi pangan di Kabupaten Sleman kondisinya tetap stabil.

Upaya yang dilakukan bagian Pangan bersama dinas pertanian dalam menangani permasalahan jumlah ketersediaan pangan yang semakin menurun yaitu dengan cara menekan semaksimal mungkin adanya alih fungsi lahan, seperti yang dikatan ibu Susi yaitu :

*“Dalam menangani permasalahan yang ada kami melakukan modernisasi sarana prasarana pertanian, menyiapkan benih yang berkualitas, mengendalikan alih fungsi lahan, meningkatkan unsure hara lahan dan meningkatkan jaringan pasar”*  
(wawancara tanggal 7 Juli 2017 )

Dalam menjaga kestabilan pangan di Kabupaten Sleman maka pemerintah menggandeng pihak petani sebagai produsen dari pertanian, kelompok-kelompok tani yang ada dimasyarakat dan juga peran pemerintah selaku pembuat kebijakan untuk melindungi lahan pertanian dan keadaan pangan di Kabupaten Sleman.

Dari penjelasan di atas maka dapat kita lihat bahwa dalam setiap tahunnya jumlah luas lahan pertanian di Kabupaten Sleman mengalami penuruna yang signifikan, penurunan luas lahan pertanian di Kabupaten Sleman itu sendiri disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal sendiri disebabkan oleh adanya jumlah pembangunan permukiman, industry, sarana dan prasarana, perdagangan dan jasa, dan pembangunan lainnya. Faktor internal penyebab terjadinya alih fungsi lahan

di Kabupaten Sleman itu disebabkan oleh pemilik lahan itu sendiri atau para petani di Kabupaten Sleman. Para petani melakukan alih fungsi lahan dikarenakan jumlah tuntutan kebutuhan kehidupan mereka, adanya pertambahan jumlah keluarganya dan penyebab lainnya yaitu masyarakat masih kurang menyadari arti penting dari lahan pertanian tersebut.

Menurunnya jumlah lahan pertanian di Kabupaten Sleman itu sendiri memiliki beberapa dampak negatif yang di timbulkan, diantaranya dampak sosial dan dampak ketahanan pangan.

Dampak sosial yang terjadi yaitu adanya penolakan yang di lakukan oleh masyarakat dengan adanya pembangunan tersebut, dengan adanya pembangunan tersebut masyarakat menilai akan menyebabkan kerusakan lingkungan sekitar pembangunan tersebut. Dampak sosial lain yang ditimbulkan adalah adanya kesenjangan antara masyarakat asli dan masyarakat pendatang.

Dampak bagi ketahanan pangan di Kabupaten Sleman itu dapat dilihat dari menurunnya hasil produksi pertanian Kabupaten Sleman. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa menurunnya jumlah produksi pertanian berpengaruh terhadap ketersediaan pangan di Kabupaten Sleman.

Sampai Tahun 2017 akibat dari alih fungsi lahan berpengaruh terhadap penurunan jumlah hasil produksi pertanian dan menurunnya jumlah ketersediaan pangan di Kabupaten Sleman. Jumlah produksi hasil pertanian di Kabupaten Sleman masih mencukupi Kebutuhan pangan di Kabupaten Sleman, bahkan hasil Produksi pertanian di Kabupaten Sleman masih mengalami surplus.

Dengan keseluruhan permasalahan yang terjadi diatas maka Maka dari itu diperlukan adanya kebijakan dari pemerintah untuk mengatasi masalah alih fungsi ini. Dari hasil penelitian, implikasi kebijakan yang seharusnya dilakukan adalah sebagai berikut :

### 1. Aspek Ekonomi

a. Membangun instrumen kebijakan salah satunya adalah dengan memberikan insentif kepada petani. Pemberian insentif dibutuhkan para petani sebagai upaya agar petani menjaga sawah yang dimiliki. Insentif yang diberikan berupa subsidi pupuk dan benih yang ditunjukkan untuk mengurangi biaya produksi, sehingga mampu meningkatkan keuntungan usaha tani. Adanya keringanan dalam membayar pajak sawah juga akan meringankan beban petani sehingga petani akan mempertahankan sawah yang dimiliki dibanding melakukan alih fungsi lahan pertanian yang dimiliki. Pemberian insentif diatur dalam UU No.41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

### 2. Membuat asuransi pertanian

Asuransi pertanian merupakan salah satu bentuk pembiayaan untuk melindungi petani dari berbagai risiko usaha pertanian. Salah satu syarat untuk menjadi peserta asuransi pertanian, petani bersepakat membayar iuran sejumlah tertentu sebagai premi asuransi. Besaran premi asuransi sebesar 2,5 persen – 3,5 persen dari harga pertanggunganaan yang ditetapkan berdasarkan biaya produksi sesuai jenis komoditas masing-masing. Mekanisme pelaksanaan pembayaran ganti rugi

adalah Petani/Poktan/Gapoktan dapat mengajukan klaim ke penanggung konsorsiummelalui broker asuransi. Penanggung konsorsium akan meneliti dokumendan survei lapangan. Persyaratan yang telah dipenuhi kemudian disetujuidan pembayaran klaim dilakukan kepada petani/ poktan/ gapoktan(Kementerian Pertanian, 2012).

1. Pengenaan pajak progresif pada pembelian lahan sawah lebih aplikati Upaya pencegahan alih fungsi lahan sawah sulit dilakukan, upaya yang dapat dilakukan hanya bersifat pengendalian. Pengenaan pajak pada pembelian sawah harus disertai dengan peraturan yang tegas agar pengenaan pajak dapat diterapkan secara optimal. Sehingga dana penerimaan pajak tersebut dapat digunakan untuk pencetakan sawah baru serta perbaikan irigasi.

## 2. Aspek Sosial

- a. Memperbaiki sistem penataan kelembagaan di tingkat petani Kelembagaan memegang peranan penting untuk menjamin suatu program dapat berjalan terus-menerus dan mencapai tujuan. Kelembagaan yang ada di petani adalah gapoktan. Perbaikan dalam sistem penataan di gapoktan seperti pembelian pupuk secara terpusat, pemasaran hasil produksi padi akan membuat petani lebih diuntungkan. Hal ini akan membuat petani mempertahankan lahan sawahnya daripada melakukan alih fungsi lahan.

- b. Pembatasan dan pengendalian luasan, jenis, dan lokasi alih fungsi Penggunaan lahan dari lahan pertanian menjadi permukiman, kawasan bisnis, dan kawasan industri perlu dibatasi penggunaannya. Pembatasan dan pengendalian alih fungsi

lahan pertanian perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah seperti ditetapkan dalam sebuah peraturan daerah tentang kebijakan dalam penggunaan lahan pertanian. Pembatasan lahan dapat dilihat dari luasan, jenis, dan lokasi alih fungsi. Hal ini dilakukan agar laju alih fungsi lahan tidak terlalu tinggi, sehingga dampak negatif bagi ketahanan pangan dapat diminimalisir.

c. Mengadakan penyuluhan pertanian. Adanya penyuluhan pertanian mampu meningkatkan produktivitas pertanian, sekaligus meningkatkan pendapatan per kapita petani. Keberadaan para penyuluh, memberikan masukan ide dan pendidikan soal pertanian, baik dalam produksi dan pemasarannya. Kegiatan penyuluhan pertanian diharapkan mampu meningkatkan peran aktif para petani dan pelaku usaha pertanian lainnya melalui pendekatan partisipatif. Melalui kegiatan penyuluhan, petani dapat meningkatkan kemampuannya agar dapat mengelola usaha taninya dengan produktif, efisien dan menguntungkan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan keluarganya. Hal ini dianggap menjadi salah satu faktor yang dapat meminimalisir terjadinya alih fungsi lahan.

